

PENGARUH KECERDASAN BUATAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Ahmad Sampurna¹, Intan Safitri², Nabila Maharani³, Novia Irawan Dalimunthe⁴, Ramayati⁵,
Muhammad Syarqawi A. Nasution⁶

ahmadsampurna@uinsu.ac.id¹, intansafitriww@gmail.com², nabilamaharani2233@gmail.com³,
novia17april2003@gmail.com⁴, ramayati726@gmail.com⁵, mhdsyarqawi@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk ranah komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh AI dalam mengubah cara aktor politik berinteraksi dengan publik, menyusun strategi kampanye, serta membentuk opini masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai studi dan fenomena terkini terkait integrasi AI dalam proses komunikasi politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI berperan penting dalam pemetaan perilaku pemilih, personalisasi pesan politik, serta penyebaran informasi secara masif dan cepat melalui berbagai platform digital. Meski demikian, kehadiran AI juga menimbulkan tantangan etis dan risiko manipulasi informasi yang perlu diantisipasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika baru dalam komunikasi politik di era digital yang semakin canggih.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Komunikasi Politik, Kampanye Digital.

ABSTRACT

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has had a significant impact across various sectors, including the realm of political communication. This study aims to examine the extent to which AI influences how political actors engage with the public, design campaign strategies, and shape public opinion. A qualitative approach is employed to analyze recent studies and phenomena related to the integration of AI into political communication processes. The findings indicate that AI plays a crucial role in mapping voter behavior, personalizing political messages, and disseminating information rapidly through various digital platforms. However, the emergence of AI also presents ethical challenges and risks of information manipulation that must be addressed. This research contributes to a deeper understanding of the evolving dynamics in political communication within an increasingly sophisticated digital era.

Keywords: Artificial Intelligence, Political Communication, Digital Campaign.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara global, termasuk dalam bidang politik. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh dalam dekade terakhir adalah kecerdasan buatan (AI), yang kini digunakan secara luas dalam strategi komunikasi politik modern. AI memungkinkan aktor politik untuk mengakses dan menganalisis data dalam jumlah besar, menyusun pesan yang disesuaikan dengan target audiens, serta menyebarkan informasi secara masif dan real-time melalui berbagai platform digital. Transformasi ini menandai pergeseran dari komunikasi politik tradisional menuju pendekatan yang lebih terotomatisasi dan berbasis data. (Rulli Nasrullah, 2015: 87)

Integrasi AI dalam komunikasi politik bukan hanya mempercepat proses penyampaian pesan, tetapi juga memberikan peluang baru untuk mempengaruhi opini publik secara lebih efektif. Penggunaan chatbot, algoritma prediktif, hingga analisis sentimen media sosial menjadi instrumen strategis dalam kampanye dan pengambilan keputusan politik. (Cangara Hafied, 2014: 129) Namun demikian, di balik berbagai kemajuan tersebut, muncul pula tantangan etis seperti penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan pelanggaran privasi pengguna. (Budi Raharjo, 2019: 56)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kecerdasan buatan memengaruhi pola komunikasi politik, baik dari sisi strategi maupun dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini penting untuk memahami peran AI dalam membentuk demokrasi digital serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul. (Deddy Mulyana, 2021: 212)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali persepsi politisi, ahli AI, atau publik terhadap penggunaan AI dalam komunikasi politik, serta dampaknya terhadap etika komunikasi dan kualitas demokrasi, selain itu untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam komunikasi politik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan interaksi teknologi dan strategi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kecerdasan Buatan dalam Strategi Komunikasi Politik Modern

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu, komputer diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. (Hendra Jaya, 2018 : 3).

Istilah "Artificial Intelligence" akan dikaitkan dengan nama John McCarthy (1927-2011). Ia adalah computer scientist yang awalnya mengajar matematika di MIT dan Stanford University. Pada tahun 1956, ia menyelenggarakan proyek penelitian di Dartmouth University yang berlangsung selama sepuluh minggu. Ia menyebut proyek tersebut sebagai sebuah "study of artificial intelligence". Itulah kali pertama istilah "artificial intelligence" digunakan. Tujuan dari studi AI kala itu sangatlah ambisius. (Taulli, 2019 : 7) Studi ini dimaksudkan untuk meningkatkan basis perkiraan bahwa setiap aspek pembelajaran (learning) atau segala bentuk lain dari kecerdasan (intelligence) pada prinsipnya dapat disimulasikan oleh mesin. Sebuah upaya akan dibuat untuk menemukan bagaimana agar mesin-mesin bisa berbahasa, membentuk konsep dan abstraksi, menyelesaikan beragam permasalahan, dan meningkatkan (improve) dirinya sendiri. (Michael Reskianto Pabubung, 2023: 68).

Kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah komunikasi politik. Dalam konteks ini, AI digunakan untuk menganalisis data pemilih, menyusun pesan kampanye yang efektif, serta menyebarkan informasi secara luas dan tepat sasaran. Penggunaan AI dalam komunikasi politik memungkinkan partai politik dan kandidat untuk memahami perilaku pemilih, preferensi, dan opini publik secara lebih mendalam, sehingga strategi kampanye dapat disesuaikan secara real-time untuk meningkatkan efektivitasnya. (Nunik H. & Alfiana Y. R, 2024: 104).

Dalam memahami sistem politik berbasis komunikasi media dengan aplikasi kecerdasan buatan pendekatan komunikasi merupakan metode fundamental untuk membangun interaksi dengan individu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi, yang mencakup komunikasi verbal dan tertulis. Secara konseptual, media komunikasi dapat ditelaah melalui kerangka pemikiran Harold Laswell tentang saluran dan platform yang digunakan dalam proses komunikasi, termasuk interaksi langsung dan tatap

muka.

Dalam publikasinya, Mingkid merujuk perspektif Siagian dan Onong yang menegaskan bahwa proses komunikasi minimal melibatkan dua komponen kunci: saluran dan perangkat yang digunakan komunikator untuk mentransfer pesan. Lebih lanjut, media didefinisikan sebagai wahana atau saluran yang memfasilitasi pengiriman pesan ketika terdapat jarak atau keterbatasan jumlah partisipan (Mingkid, 2012: 190).

Analisis Peran AI dalam Strategi Komunikasi Politik:

1. Analisis Big Data dan Prediksi Perilaku Pemilih

AI memungkinkan analisis big data dari berbagai sumber, seperti media sosial, survei, dan data demografis, untuk memahami perilaku dan preferensi pemilih. Dengan machine learning, AI dapat memprediksi tren pemilih dan segmentasi audiens, sehingga pesan kampanye dapat disesuaikan untuk masing-masing segmen. (Faiz Akmal, Fitri Marsheila, & Rana Rau'atur, 2024: 41)

2. Personalisasi Pesan Kampanye

Melalui AI, pesan kampanye dapat dipersonalisasi berdasarkan data individu pemilih, seperti minat, lokasi, dan perilaku online. Hal ini meningkatkan relevansi pesan dan kemungkinan pemilih terpengaruh oleh kampanye tersebut.

3. Otomatisasi dan Efisiensi Komunikasi

AI digunakan untuk mengotomatisasi berbagai aspek komunikasi politik, seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan pemilih, penjadwalan posting media sosial, dan analisis sentimen publik secara real-time. Ini memungkinkan respon cepat terhadap isu-isu yang muncul dan efisiensi dalam pengelolaan kampanye.

b. Pengaruh Kecerdasan Buatan terhadap Pola Komunikasi antara Aktor Politik dan Masyarakat

Pengaruh kecerdasan buatan (AI) terhadap pola komunikasi antara aktor politik dan masyarakat di Indonesia telah membawa transformasi signifikan dalam cara komunikasi politik dilakukan. AI memungkinkan personalisasi pesan, analisis data pemilih yang lebih mendalam, serta efisiensi dalam kampanye politik.

Berikut adalah bentuk-bentuk pengaruh kecerdasan buatan terhadap komunikasi politik:

1. Personalisasi Pesan Politik melalui Analisis Data Pemilih

AI memungkinkan aktor politik untuk menganalisis data pemilih secara mendalam, sehingga pesan kampanye dapat disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pemilih. Dengan memanfaatkan big data dan machine learning, partai politik dapat mengidentifikasi pemilih potensial dan menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif.

Sebagai contoh, penggunaan platform Pemilu.AI di Indonesia menunjukkan bagaimana AI dapat membantu dalam merancang kampanye yang lebih terarah dan efisien. Platform ini menggabungkan big data dan AI untuk memberikan wawasan penting mengenai perilaku pemilih, memungkinkan kampanye yang lebih personal dan efektif.

2. Transformasi Strategi Kampanye Politik

Implementasi AI dalam kampanye politik telah mengubah pendekatan tradisional menjadi lebih berbasis data dan teknologi. AI digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi pemilih, menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan, dan memilih saluran komunikasi yang paling efektif.

Dalam konteks Indonesia, AI telah mulai diterapkan dalam iklan politik dan kampanye digital, meskipun masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital. (Mirza, I.M. 2023: 65)

3. Perubahan Interaksi antara Aktor Politik dan Masyarakat

AI juga mempengaruhi cara interaksi antara aktor politik dan masyarakat. Melalui chatbot dan asisten virtual, politisi dapat menjawab pertanyaan masyarakat secara real-time, meningkatkan keterlibatan dan responsivitas. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan etika, seperti potensi penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulasi opini publik. (Guzman, A. L., & Lewis, S. C. 2020: 135).

Kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi antara aktor politik dan masyarakat di Indonesia. Dengan memanfaatkan AI, komunikasi politik menjadi lebih personal, efisien, dan responsif. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dilakukan secara etis dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas proses demokrasi.

c. Dampak Positif dan Negatif dari Penggunaan AI dalam Komunikasi Politik Terhadap Pembentukan Opini Publik

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam komunikasi politik telah memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia, baik dalam sisi positif maupun negatif. Secara deskriptif, AI kini memainkan peran strategis dalam menyusun, menyebarkan, dan mempersonalisasi pesan-pesan politik yang ditujukan kepada masyarakat. Teknologi ini digunakan oleh para aktor politik untuk mengumpulkan data besar (big data) dari media sosial, platform digital, dan sumber-sumber daring lainnya, yang kemudian diolah menggunakan algoritma tertentu untuk memahami pola perilaku, preferensi, dan kecenderungan politik masyarakat.

Dampak positif dari penggunaan AI dalam komunikasi politik terutama terlihat dalam kemampuannya menciptakan efisiensi dan efektivitas kampanye. Aktor politik tidak lagi harus menyampaikan pesan secara umum kepada seluruh masyarakat, tetapi dapat menyesuaikan pesan berdasarkan data demografis, psikografis, dan geografis pemilih. Hal ini membuat pesan politik menjadi lebih relevan dan menyentuh langsung isu-isu yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Misalnya, penggunaan Pemilu.AI di Indonesia mampu membantu tim kampanye dalam memahami lokasi pemilih potensial, isu utama di daerah tertentu, dan waktu terbaik untuk berinteraksi secara daring. Hal ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi politik dan mendekatkan aktor politik dengan masyarakat.

Namun demikian, kehadiran AI dalam komunikasi politik tidak lepas dari dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kecenderungan AI untuk menciptakan polarisasi informasi. Algoritma yang digunakan dalam platform media sosial dan aplikasi kampanye sering kali hanya menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan politik pengguna. Fenomena ini dikenal sebagai "filter bubble" atau gelembung informasi, di mana masyarakat hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan menyingkirkan informasi yang berseberangan. Akibatnya, ruang publik digital menjadi semakin terfragmentasi dan dialog antar kelompok masyarakat menjadi terhambat (Nurfajri, 2025: 1).

Selain itu, AI juga dapat dimanfaatkan secara tidak etis untuk memanipulasi informasi publik. Salah satu kasus di Indonesia adalah penggunaan teknologi deepfake untuk menciptakan konten video atau suara palsu yang menampilkan tokoh politik tertentu dalam konteks yang menyesatkan. Praktik ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat secara negatif terhadap lawan politik, dan secara umum merusak integritas demokrasi (Subadi, 2024: 88). Penggunaan AI yang tidak dikontrol dengan baik juga dapat memperkuat penyebaran hoaks politik dan mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.

Oleh karena itu, meskipun AI memberikan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan publik dalam komunikasi politik, dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan regulasi yang ketat dan kesadaran etis dari para pelaku politik

agar teknologi ini digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan justru melemahkannya. Transparansi algoritma, edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta pengawasan penggunaan AI dalam kampanye politik menjadi langkah penting untuk menjaga pembentukan opini publik yang sehat dan adil.

Setiap perkembangan selalu memberi dampak positif tetapi juga tak bisa mengelak dari dampak negatif. Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah memberikan banyak dampak positif. Akan tetapi, teknologi ini juga menyisakan dampak negatif yang kadangkala tidak secara langsung dan tidak kasat mata. Oleh karena itu, meskipun AI memberikan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan publik dalam komunikasi politik, dampak negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Dibutuhkan regulasi yang ketat dan kesadaran etis dari para pelaku politik agar teknologi ini digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan justru melemahkannya. Transparansi algoritma, edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta pengawasan penggunaan AI dalam kampanye politik menjadi langkah penting untuk menjaga pembentukan opini publik yang sehat dan adil.

d. Penerapan Etika Komunikasi Politik dalam Konteks Penggunaan AI

Etika komunikasi politik adalah cabang dari etika komunikasi yang mengatur bagaimana pelaku politik—seperti politisi, partai politik, media, dan publik—berkomunikasi dalam ranah politik secara bertanggung jawab, jujur, dan adil. Etika ini menjadi penting karena komunikasi politik berpengaruh langsung terhadap pembentukan opini publik, pengambilan keputusan politik, dan kualitas demokrasi.

Penerapan etika komunikasi politik dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI) merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. AI telah merevolusi cara komunikasi politik berlangsung, mulai dari kampanye hingga penyebaran informasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan etis yang signifikan.

Salah satu tantangan utama adalah potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif melalui AI. Dalam konteks ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial. Penggunaan AI dalam komunikasi politik harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari dalam jurnal mereka yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI di Indonesia (Nasman, Pudji Astuti & Dita, 2024:15).

Selain itu, penggunaan AI dalam kampanye politik dapat menimbulkan isu privasi dan keadilan. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi pemilih untuk menargetkan pesan kampanye secara spesifik. Praktik ini dapat melanggar privasi individu dan menciptakan ketidakadilan dalam akses informasi politik. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan privasi dalam penggunaan AI di ranah politik.

Dalam konteks etika komunikasi politik, AI juga harus digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk melemahkannya. Penggunaan AI harus mendorong partisipasi politik yang inklusif dan mencegah penyebaran ujaran kebencian atau disinformasi. Hal ini memerlukan kerangka kerja etika yang jelas dan penegakan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dalam komunikasi politik.

Secara keseluruhan, penerapan etika komunikasi politik dalam penggunaan AI memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat yang memperkuat demokrasi dan komunikasi politik yang sehat.

KESIMPULAN

Kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara aktor politik dan publik, seperti dalam analisis opini, penyebaran pesan kampanye yang tersegmentasi, serta otomatisasi konten. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi, terutama terkait etika, privasi, transparansi, dan potensi manipulasi informasi. Oleh karena itu, penggunaan kecerdasan buatan dalam komunikasi politik harus dilakukan secara bertanggung jawab dan etis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan informasi, dan perlindungan hak-hak warga negara. Tanpa kerangka regulasi dan etika yang kuat, AI berisiko menjadi alat yang justru merusak integritas politik dan kepercayaan publik.

Penggunaan kecerdasan buatan dalam komunikasi politik tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasar, seperti kebebasan berpendapat dan akses yang adil terhadap informasi. Dalam hal ini, regulator dan pihak terkait perlu mengembangkan kebijakan yang jelas untuk membatasi penggunaan AI yang dapat merugikan publik, seperti pengaruh yang tidak adil terhadap pemilih atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Sebagai alat yang semakin berkembang, kecerdasan buatan dalam komunikasi politik juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Organisasi internasional, pemerintah, dan platform teknologi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sempit atau manipulasi massa. Sehingga, kecerdasan buatan, meskipun bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik, tetap harus dipandang sebagai alat yang harus dijaga agar tidak mengancam nilai-nilai dasar demokrasi dan etika politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Raharjo, (2019) *Etika Informasi di Era Digital*. Yogyakarta: Andi
- Cangara Hafied, (2014) *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deddy Mulyana, (2021) *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faiz Akmal, Fitri Marsheila, & Rana Rau'atur (2024), *Pengaruh Pemilu, AI Sebagai Platform Data Politik Digital Berbasis Artificial Intelligence dan Big Data Terhadap Kesuksesan Kampanye Politik di Indonesia*. Vol, 2 No. 1.
- Guzman, & Lewis. (2020). *Beyond Human Communication: The Artificial Intelligence Disruption in Communication Studies*, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 13, No. 1.
- Hendra Jaya, (2018) *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar
- Michael Reskianto Pabubung, (2023) *Era Kecerdasan Buatan Dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis*. Vol. 6 No. 1
- Mingkid, E. (2015). *Penggunaan Media Komunikasi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Manado*. *Sosiohumaniora*. Vol. 18 No. 3.
- Mirza, I.M. (2023) *Implementasi Artificial Intelligence Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0*. Vol. 3, No. 2.
- Nasman, Pudji Astuti & Dita Perwitasari (2024). *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia*. Vol. 5. No. 10.
- Nunik Hariyani & Alfiana Yuniar Rahmawati, (2024) *Media Sosial dan Aplikasi Kecerdasan Buatan Dalam Preferensi dan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum*, Vol. 11 No. 2.
- Nurfajri (2025). *Dampak Algoritma AI terhadap Komunikasi Publik : Memahami Manipulasi Informasi dan Realitas*. Vol. 1, No. 3.
- Rulli Nasrullah. (2015) *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Subadi, (2024), *Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Iklan Politik*. Vol. 12, No. 2.
- Taulli, T. (2019). *Artificial Intelligence Basic. A Non-Technical Introduction*. Apress.